

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Aksi Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	No.	Program	NO	PERMASALAHAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET						JENIS KEGIATAN AKSI	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PERINGKAT	
														SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	KOORDINATOR				PELAKSANA	
1	Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam perekonomian	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDHB	Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	15%	1	Program Pemberdayaan dan Perlingduan Koperasi	1	Mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan daerah	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	25%	Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi secara berkala.	Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan kelembagaan	3	4	4	4	15	pembinaan kelembagaan koperasi secara berkala.	Pemberdayaan an Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	13.143.000	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Koperasi	
						2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2	Belum seluruh KSP/USP Koperasi dilakukan penilaian kesehatan secara berkala.	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	25	Menyusun jadwal dan melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP sesuai ketentuan.	KSP/USP	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya.	3	4	4	4	15	Penilaian Kesehatan Koperasi Stimpun Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	6.123.400	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Koperasi	
						3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBERIKSAAN KOPERASI	3	Pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi belum optimal sehingga masih ditemukan koperasi yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola koperasi yang baik.	Meningkatnya pembinaan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	25	Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap koperasi secara berkala sesuai ketentuan.	persentase	Persentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan serta meniadkan jfth hasil pemeriksaan	3	4	4	4	15	Pemeriksaan dan Pengawasan an Melalui Koperasi, Koperasi Stimpun Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan an Melalui Koperasi dan Pemeriksaan Koperasi	7.036.300	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Koperasi	
						1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM	
Proporsi UMKM	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pertastan	Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	7,50%	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
					2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
					3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
					4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
Proporsi UMKM	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah pertastan	Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	7,50%	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
					2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
					3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
					4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4	Belum optimalnya kemitraan usaha mikro dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, dan pasar sehingga membuat akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan usaha.	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Mikro yang bertansformasi dari informal ke Formal	27,9	Memfasilitasi pembentukan dan penguatan kemitraan usaha mikro melalui kerja sama dengan dunia usaha, BUMI/BUMI, lembaga keuangan, marketplace, dan pihak terkait lainnya guna meningkatkan akses permodalan, pemasaran, serta pengembangan kapasitas usaha.	Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memperoleh kemitraan usaha.	3	4	4	4	15	fasilitasi Kemitraan an Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	474.402.550	Dinas Perdagangan dan Usaha Koperasi dan UKM	Bidang Pemberdayaan an UKM		
Proporsi UMKM																										

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	No.	Program	NO	PERMASALAHAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PERNGKAT	
														SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL				KOORDINATOR	PELAKSANA
2	Meningkatkan Nilai Tambah Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk	Persentase pemenuhan kebutuhan barang pokok yang dipenuhi	74,00%	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Sarana distribusi perdagangan belum memadai sehingga kelancaran arus barang, efisiensi distribusi, dan akses masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok belum optimal.	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	1%	Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan sarana distribusi perdagangan guna mendukung kelancaran distribusi barang dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	persentase	Persentase sarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya sesuai standar.	19	19	19	19	74	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.837.307	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
							PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Masih rendahnya pemilik atau pengelola gudang dalam mendaftarkan gudang sehingga data gudang belum lengkap dan pengawasan distribusi barang belum optimal.	Meningkatkan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase perdagangan yang difasilitasi	70%	Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, verifikasi persyaratan, dan pendampingan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang sesuai ketentuan yang berlaku.	persentase	Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang difasilitasi dan diterbitkan sesuai ketentuan.	19	19	19	19	74	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	9.845.000	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
									Pengawasan terhadap distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya (B2) belum optimal sehingga masih terdapat potensi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.	Meningkatkan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan RUPP/SIUP Pusat, Perbekelahan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	70%	Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, dan monitoring terhadap distribusi, pengemasan, serta pelabelan bahan berbahaya pada PA-B2 dan P-B2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	persentase	Persentase PA-B2 dan P-B2 yang memenuhi ketentuan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya.	19	19	19	19	74	Pengawasan dan Pemeriksaan Distribusi, Pengemasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	9.830.000	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
			Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan usaha	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	10%		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Promosi dan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk lokal, belum optimal sehingga daya saing dan pangsa pasar produk dalam negeri masih rendah.	Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/d ilaksanakan	18	Melaksanakan promosi, pameran, kampanye, serta fasilitasi penggunaan produk dalam negeri dengan pelaku usaha, instansi pemerintah, dan masyarakat.	persentase	Persentase promosi penggunaan produk dalam negeri yang difasilitasi/d ilaksanakan.	5	5	5	5	18	Promosi dan Fasilitasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	184.089.000	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
									Pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk lokal, belum optimal sehingga daya saing, akses pasar, dan minat masyarakat terhadap produk dalam negeri masih perlu ditingkatkan.	Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	N/A	Melaksanakan kegiatan pemasaran, pameran, business matching, dan fasilitasi penggunaan produk dalam negeri melalui sinergi dengan pelaku usaha,	persentase	Persentase pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang difasilitasi/d ilaksanakan.	5	5	5	5	18	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) di Tingkat Kabupaten/ Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	313.247.500	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
							Program Pengembangan Ekspor		Potensi ekspor produk unggulan daerah belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kapasitas pelaku usaha, akses informasi pasar ekspor, pemenuhan standar mutu, serta jejaring pemasaran internasional.	Meningkatkan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	4,20	Melaksanakan pembinaan, pendampingan, promosi, dan fasilitasi pengembangan ekspor melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penyediaan informasi pasar, pemenuhan persyaratan ekspor, business matching, serta perluasan akses pasar	persentase	Persentase pelaku usaha berorientasi ekspor yang memperoleh fasilitasi pengembangan ekspor.	5	5	5	5	18	Pembangunan dan Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah.	Pameran Dagang Nasional	287.444.000	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
			Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk	Persentase pemenuhan kebutuhan barang pokok yang dipenuhi			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		Penerapan standar barang beredar dan perlindungan konsumen belum optimal sehingga masih ditemukan barang yang tidak memenuhi ketentuan serta rendahnya	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	Meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	3,33	Melaksanakan pengawasan barang beredar, pembinaan kepada pelaku usaha, dan pelaksanaan Tera/ Tera ulang UTPP	persentase	Persentase pengawasan barang beredar yang dilaksanankan sesuai ketentuan.	5	5	5	5	18	Pengawasan Barang Beredar, Pembinaan Pelaku Usaha, Sosialisasi, dan Perlindungan Konsumen pelaksanaan Tera/ Tera ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	22.858.900	Dimas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	No.	Program	NO	PERMASALAHAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PERNGKAT	
														SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL				ROORDINATOR	PELAKSANA
			Meningkatnya kemudahan perizinan dan layanan usaha	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	6%		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan fluktuasi harga, pelanggaran pasokan, dan terganggunya stabilitas distribusi barang di wilayah kabupaten/kota.	Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	6	Melaksanakan pengawasan barang beredar, pembinaan kepada pelaku usaha perlindungan konsumen, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penanganan pengaduan masyarakat untuk menjamin pemenuhan standar	persentase	Persentase pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen yang dilaksanakan sesuai ketentuan.	1	1	2	2	6	Pengawasan Barang Beredar, Pembinaan Pelaku Usaha, Kebutuhan Sosialisasi, dan Perlindungan Konsumen.	Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	9.845.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
									Pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk serta pestisida bersubsidi belum optimal sehingga masih berpotensi terjadi penyimpangan distribusi, ketidaktepatan sasaran penerima, dan penyalahgunaan dalam pemanfaatannya.		Persentase kinerja realisasi pupuk	57	Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan instansi terkait terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi untuk memastikan ketepatan sasaran, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat	persentase	Persentase penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Satuun:	1	1	2	1	5	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.850.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Perdagangan
3	Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	71,00%		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga daya saing tenaga kerja serta tingkat penyerapan tenaga kerja masih perlu ditingkatkan.	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja			Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri agar kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	persentase	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja dan mengalami peningkatan kompetensi serta produktivitas.	8	8	8	8	32	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Peningkatan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	216.809.450	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Pelatihan dan Penguatan Tenaga Kerja
					55,00%		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Masih Belum semua Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi		Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, verifikasi, dan fasilitasi pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi perusahaan	persentase	Persentase perusahaan yang menyusun dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).	1	2	1	2	6	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	25.049.900	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	82		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN AKUNTABILITAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dokumentasi dan Administrasi SAKIP Belum Tertib	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dokumen SAKIP	Dokumen	SOP pengelolaan dokumen SAKIP yang disusun dan diterapkan	5				5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	8.075.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	No.	Program	NO	PERMASALAHAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PERNGKAT		
														SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL				KOORDINA TOR	PELAKSANA	
											Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,00	Melakukan inventarisasi dan penataan seluruh dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	dokumen	dokumen SAKIP yang terdokumentasi dengan lengkap		5				5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.300.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
											Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100	Menata dan mengarsipkan seluruh dokumen keuangan sesuai ketentuan	dokumen	dokumen keuangan yang tertata dan terdokumentasi		2	0	0	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.570.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Melakukan penataan dan pembaruan data kepegawaian secara berkala	dokumen	data kepegawaian yang telah diperbarui		2	3	2	3	10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.275.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tertib administrasi umum	kali	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		1	1	2	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi umum sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas perangkat	kali	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		1	2	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.708.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Memastikan penyediaan jasa listrik, air, internet, telepon, dan jasa kebersihan sesuai kebutuhan	Dokumen	Dokumen rencana kebutuhan jasa penunjang yang disusun		3	3	3	3	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Surat Menyurat	39.459.184	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Memastikan penyediaan jasa listrik, air, internet, telepon, dan jasa kebersihan sesuai kebutuhan	Dokumen	Dokumen rencana kebutuhan jasa penunjang yang disusun		3	3	3	3	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.151.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Memastikan penyediaan jasa listrik, air, internet, telepon, dan jasa kebersihan sesuai kebutuhan	Dokumen	Dokumen rencana kebutuhan jasa penunjang yang disusun		3	3	3	3	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	87.614.660	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	No.	Program	NO	PERMASALAHAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET					JENIS KEGIATAN AKSI	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PERINGKAT	
														SATUAN	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL				ROKORDINATOR	PELAKSANA
													Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan mesin	Dokumen	Dokumen rencana pemeliharaan BMD yang disusun	2	3	2	3	10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.431.600	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan mesin	Dokumen	Dokumen rencana pemeliharaan BMD yang disusun	3	3	3	3	12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.780.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat
													Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap gedung, kendaraan dinas, peralatan, dan mesin	Dokumen	Dokumen rencana pemeliharaan BMD yang disusun	1	1	1	1	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.440.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM	Sekretariat

Pariaman, Februari 2026
DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI DAN UKM
KAMPUS PADANG PARIAMAN
Pembina Usaha Muka R.P. 197309221993111001

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH DISDAGNAKERKOP

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	✓
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	